

DEDOLARISASI DAN UPAYA ASEAN MENJADI PUSAT EKONOMI DUNIA

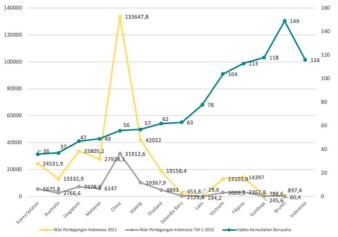
Ariesy Tri Mauleny
Analis Legislatif Ahli Muda
ariesy.mauleny@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik diproyeksikan ADB tumbuh 4,8% lebih baik dari tahun 2022 (4,2%). Ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5% selama enam kuartal berturut-turut dan mencapai 5,03% (yoy) pada kuartal I-2023, jauh dari prediksi IMF yang menyebut ekonomi dunia suram. Ekonomi RI pulih lebih cepat terlihat dari *consumer confidence* yang masih cukup kuat didorong inflasi daerah yang turun cukup cepat menjaga daya beli sehingga konsumsi masih menjadi motor penggerak ekonomi. Dari segi pertumbuhan investasi, BKPM menyebut kuartal I-2023 merupakan yang tertinggi mencapai Rp328,9 triliun atau tumbuh 16,5% dibandingkan kuartal I-2022 (yoy). Momen positif ini memperbesar potensi ASEAN menjadi pusat stabilitas dan ekonomi dunia pada tahun 2045, seperti disampaikan Ketua ASEAN Business Advisory Council (BAC).

Roadmap ASEAN-BAC mendorong integrasi dan kohesivitas ekonomi regional, mempromosikan legasi proyek jangka panjang, mendorong potensi aset sebagai *epicentrum of growth*. Indonesia lebih berpeluang secara geoekonomi karena secara geografis terletak di antara Asia Tenggara, Asia Timur, dan Australia sehingga menjadi gerbang regional penting bagi perdagangan dan investasi. Ditambah potensi sumber daya alam, bonus demografi dan pasar yang besar, berpeluang menjadikan Indonesia produsen dan pengekspor utama di Kawasan ASEAN dalam konteks akselerasi kerja sama ekonomi di tengah ketidakpastian dan rivalitas global yang kian tinggi.

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) terbukti mendorong kinerja perdagangan ASEAN yang tahun 2021 mencapai USD3,34 triliun, meningkat 25,56% dibandingkan tahun 2020 (USD2,66 triliun). Kinerja perdagangan Indonesia juga meningkat mencapai USD54,35 miliar pada kuartal I-2023, potensial menempatkan Indonesia sebagai regional production hub terbesar. Namun belum sepenuhnya meningkatkan performa perdagangan Indonesia mengingat indeks kemudahan berusaha masih di peringkat 116. Dibutuhkan reformasi struktural, reformasi birokrasi, dan deregulasi, disamping relokasi rantai pasok global ke Indonesia (Gambar 1).



Gambar 1. Nilai Perdagangan Indonesia dan Indeks Kemudahan Berusaha

Center of Reform on Economics Indonesia menilai Kawasan ASEAN **ASEAN** kompetitif secara parsial. sebagai *production* based terjadi namun tidak merata. Ketika Vietnam relokasi mendapat investasi manufaktur favorit dari China, tidak untuk Indonesia. RCEP seharusnya menjadi solusi kinerja perdagangan Kawasan ASEAN yang berimbas positif pada investasi dan jasa lainnya. Sejauh ini, potensi ekspor Indonesia mencapai USD53,2 miliar atau 19,3% pada tahun 2022.

Sebagai bagian dari penguatan ASEAN, dedolarisasi yang diusung Indonesia melalui penguatan konektivitas pembayaran antarnegara di regional ASEAN, dengan memperluas kerja sama penggunaan mata uang lokal menandai babak baru uji ketangguhan mata uang domestik melawan dollar AS. Pembentukan satuan tugas untuk mengeksplorasi kerangka transaksi mata uang lokal ASEAN, diperluas ke negara mitra sehingga integrasi keuangan regional melalui perdagangan dan investasi intra-ASEAN semakin kuat, dan mengikis ketergantungan terhadap dollar AS. Sebagaimana BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) yang mengurangi penggunaan dollar AS dalam transaksi antarnegara. Begitu juga Uni Eropa yang telah dua dekade memprioritaskan euro. IMF mencatat, terjadi penurunan kembali penggunaan dollar AS dari 70% menjadi 50%. Sementara Lembaga Investasi Eurizon menyebut porsi dollar AS sebagai cadangan devisa global terus menurun, dari 73% pada 2001 menjadi 58% pada tahun 2022. Bank Indonesia pun agresif melakukan kerja sama *local currency transaction* (LCT) secara bilateral, di antaranya Thailand, Malaysia, Jepang, China, dan Korea Selatan.

Beberapa manfaat dedolarisasi: *pertama*, efisiensi transaksi dagang dan investasi antar negara. *Kedua*, menguatkan daya tahan menghadapi ancaman krisis global karena semakin banyaknya diversifikasi mata uang rupiah dalam berbagai transaksi internasional. *Ketiga*, menguatkan neraca pembayaran dan kesehatan fiskal ketika dolar AS lebih terdepresiasi dan stabil. Khususnya di tengah gejolak pasar keuangan global yang masih memanas akibat krisis industri perbankan dan plafon utang AS.

tensi DP

DPR RI perlu memastikan implementasi sejumlah bauran regulasi omnibus law seperti UU Cipta Kerja, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), dan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) menjadi langkah strategis Indonesia dalam mendukung misi dedolarisasi dan upaya mewujudkan ASEAN sebagai pusat ekonomi dunia melalui ekosistem investasi dan iklim berusaha, serta penguatan kinerja perdagangan Kawasan. DPR RI melalui Komisi XI mendorong Kemenkeu, BI, OJK, LPS, dan KSSK berkolaborasi menjaga stabilitas sektor keuangan di satu sisi dan mendorong sektor dan daerah memanfaatkan momen akselerasi dengan menguatkan kinerja perdagangan kawasan dan membangun fondasi rantai pasok global khususnya di sektor industri pengolahan, dengan perluasan investasi berkualitas dan infrastruktur digital, sinergi dan inovasi ekonomi keuangan digital, dengan tetap berupaya membatasi *trade off* dengan sejumlah standar ketenagakerjaan dan lingkungan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Sumber

Bisnis Indonesia, 11 Mei 2023; Bisnis Liputan6.com, 14 Mei 2023; cnbcindonesia.com, 10 dan 11 Mei 2023; Kompas, 11 Mei 2023; dan Rakyat Merdeka 11, 12, dan 15 Mei 2023.



//puslit.dpr.go.id

ny Hendra P. Retnaningsih

LAYOUTER

@anlegbkofficial

Dewi Sendhikasari D. Sita Hidriyah Noverdi Puja S.

Novianto M. Hantoro

©PuslitBK2023

Polhukam

Prayudi

Simela Victor M.

Ekkuinbang Sri Nurhayati Q. Sulasi Rongiyati Rafika Sari Eka Budiyanti Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani Teddy Prasetiawan T. Ade Surya Masyithah Aulia A. Yosephus Mainake **Kesra** Yulia Indahri Trias Palupi K. Luthvi Febryka Nola

ni Mohammad Teja awan Nur Sholikah P.S. Fieka Nurul A.